



Judul	: jangan pernah tergiur pajak judi online
Tanggal	: Senin, 11 September 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Jangan Pernah Tergiur Pajak Judi Online

PEMERINTAH diminta tidak tergiur dengan pajak judi *online*. Wacana pajak judi *online* tersebut muncul karena aliran uang yang terbang ke luar negeri lewat judi *online* mencapai US\$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Wacana ini disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, pekan lalu.

"Di dalam agama Islam berjudi hukumnya ialah haram. Ini artinya Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Di negara kita Indonesia berjudi juga dilarang ini bisa dipahami dari Pasal 303 KUHP," ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, kemarin.

Menurut dia, jika pemerintah mengenakan pajak terhadap

dap judi *online*, ini dapat diartikan pemerintah telah melegalisasi praktik perjudian. Kalau itu yang terjadi, falsafah dan hukum dasar yang diperlukan oleh sang pengusaha sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan bukan lagi Pancasila dan UUD 1945, tapi ialah falsafah materialisme, hedonisme, dan pragmatisme.

"Bila itu yang terjadi, berarti pemerintah telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, yaitu melindungi rakyat dan menyejahterakan mereka," ujar Anwar.

"Kalau hal itu dibiarkan tetap terus berlangsung, itu berarti tanda tanda kehancuran dari negeri ini sudah mulai kelihatan dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan," tambahnya.

Dia menegaskan pemerintah

tah seharusnya tidak berpikir untuk mengenakan pajak terhadap judi *online*, tapi dengan tegas memblokir, menutup, menindak, serta mematikan akses dan situs judi *online*.

Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar pemerintah mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi.

Alih-alih memanfaatkan potensi pajak dari judi *online*, Haedar berharap pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila dengan menutup akses judi atau bahkan memblokirnya.

"Ya, terserahlah, kebijakan kebijakan yang lebih memblokir, ya tidak memberi ruang yang leluasa. Pokoknya semua-

nya (kebijakan) harus di atas tanggung jawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa," kata Haedar.

Selain bertentangan dengan konteks keindonesiaan, wacana wacana pragmatis seperti itu, kata Haedar, justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen para pejabat negara untuk menjalankan amanat pemerintahan sesuai pedoman Pancasila.

"Itulah kemudian yang menimbulkan opini kuat di kalangan umat beragama bahwa satu sisi (negara) begitu sensitif terhadap polemik dan ekspresi umat beragama, sementara di sisi lain memberikan kelonggaran," tegasknya. (Des/X-5)